



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

PERUBAHAN



**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Surabaya, Juli 2020

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan HidayatNya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol tahun 2020 ini dapat diselesaikan tepat waktu dan telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Biro Humas dan Protokol mempunyai peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pelayanan publik, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Didasarkan Peraturan Daerah tersebut, Biro Humas dan Protokol mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pelayanan Informasi, peningkatan komunikasi publik dan upaya penciptaan citra Pemerintah Propinsi Jawa Timur, pelayanan keprotokolan dan pelayanan administrasi kerjasama.Pada akhirnya Biro Humas dan Protokol diharapkan akan mendukung Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur lebih optimal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Seiring dengan dinamika pembangunan, kebijakan dan program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis.Oleh karena itu, kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga ini.Kepada semua pihak yang telah bekerjasama, disampaikan terima kasih.

Kepala Biro Humas Dan Protokol



AGUNG SUBAGYO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19750330 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II (Tabel 2.1).
- 2.2. Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat daerah Tahun 2020.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran
- 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Biro Humas Dan Protokol Tahun 2020 (Tabel 3.1)
- 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Biro Humas Dan Protokol Tahun 2020 (Tabel 3.2)

BAB IV PENUTUP

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah Covid-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke hampir belahan Dunia. Setiap negara yang terjangkit Covid-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani Covid-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi.

Salah satu cara memutus matarantai Covid-19 adalah dengan social distancing, bertujuan mencegah orang sakit melakukan kontak dalam jarak tertentu dengan orang sehat untuk mengurangi penularan. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC) AS, social distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia sekitar 2 meter. Termasuk bekerja dari rumah (work from home), menutup sekolah/kampus dengan melakukan home schooling/belajar on line, beribadat di rumah.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19.

Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap

terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Biro Humas dan Protokol mempunyai Visi: “Layanan informasi untuk semua Masyarakat dan tata Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama yang berkualitas”, Serta Misi:“Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan adanya perencanaan program yang baik sebagai penjabaran dari visi Gubernur, sehingga perlu disusun perencanaan yang baik dan didukung oleh data/informasi yang tepat.

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur mempunyai peran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi kepada masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas Pelayanan Keprotokolan bagi Pimpinan, Pejabat Negara dan Tamu Kenegaraan yang berkunjung ke Jawa Timur;
4. Melaksanakan Kerjasama antar Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip *good governance* ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampaikannya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekwensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi.

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkatkan efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat, sementara itu di sisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah

untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya akan tepat sasaran.

Bentuk komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat luas dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik langsung maupun melalui media lain, yaitu media masa. Besarnya peranan dan pengaruh media masa, apalagi dijaman teknologi informasi seperti sekarang ini, maka pemerintah harus dapat memanfaatkan peranan media masa ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi mitra yang efektif terhadap kegiatan komunikasi dua arah dan pencitraan pemerintah daerah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang baik akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat luas.

Biro Humas dan Protokol juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan Protokoler resmi Pimpinan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, khususnya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan VVIP/Tamu lainnya yang datang menjadi tamu Pemerintah provinsi Jawa Timur. Disamping itu Biro Humas dan Protokol juga mengembangkan fungsi baru bidang Administrasi Kerjasama, baik kerjasama luar negeri maupun dalam negeri dengan sasaran meningkatkan kualitas administrasi kerjasama pemerintah provinsi Jawa Timur.

Biro Humas dan Protokol sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Recanan Strategi Pembangunan tahun 2019-2024 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Gubernur Jawa Timur yaitu "*Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlaq dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong*".

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai amanat lahirubah berapakah terakhid dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 050/10.718/201/2020 Tanggal 23 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan Renja adalah untuk merumuskan kembali rencana kerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dimaksud meliputi penyelarasan program kegiatan, indikator, kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat mengacu pada rancangan RKPD tahun 2020.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, khususnya dari aspek hubungan dan komunikasi antara Pemerintah dengan Masyarakat luas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja lembaga Biro Humas dan Protokol, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
3. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah dengan melalui berbagai media.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai Pusat Penyebarluasan informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun2020 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan program pembangunan pada Biro Humas dan Protokol.Berdasarkan latar belakang ini kemudian ditetapkan maksud dan tujuan penyusunan kebijakan, landasan hukum, kemudian juga dijelaskan perihal hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020.

Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Humas dan Protokol Triwulan IIserta Capaian Renstra Biro Humas dan Protokol, menganalisis kinerja pelayanan Biro Humas dan Protokol, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan peran dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka disusun Tujuan,Sasaran, Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol, yang diharapkan pada akhirnya akan mendukung kebijakan besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Bab IV Penutup

Bab II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Rencana Kerja (Renja) Biro Humas dan Protokol pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol selama tahun 2020.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator.

Komposisi APBD Biro Humas dan Protokol Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 untuk penyelenggaraan 5 (Lima) Program dan 15 Kegiatan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jawa Timur, telah dialokasikan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebesar Rp.31.971.056.200,-

Adapun Realisasi Anggaran s/d 31 Juli 2020 sebesar Rp 7.363.763.236,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 17,82 % sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 (TC 29)
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renta Perangkat Daerah s/d Triwulan II

No	Sasaran Renja	Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra perangkat daerah pada tahun 2024 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD tahun lalu (2019)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan yang dievaluasi (2020)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun (%)	Ket					
								I	II	III	IV										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16					
Memingkatnya Layanan Kehumasan, Kepraktisan dan Kerjasama	xxx01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	80 %	13.693.386.600		80 %	2.541.578.378	20	176.242.144	20	749.282.450		40	925.524.4594	50	36	40	925.524.594	0,50	6,76
			Persentase realisasi anggaran	90 %																	
			Indeks profesionalitas ASN	89 %																	
	xxx0101	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	5 Dok	1.200.000.000		5 Dok	116.665.000	3	26.525.000		14.740.000		3	41.265.000	60,00	35	3	41.265.000	0,60	3,44
	xxx0102	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Dok	365.000.000		5 unit	104.360.000	1	2.475.000	2	77.672.200		3	80.147.200	60,00	77	3	80.147.200	0,60	21,96

	xxx010 03	Ketatausahaan dan Kepergawaiannya	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dok	12.128.386,600			6 unit	2.320,553.378	1	147.242,144	1	656.870,250				2	804,112.394	33,33	35	2	804.112,394	66,67	6,63	
																	Rata-Rata Capaian Kinerja	2,5	36,4	50,00	46	3	36	50	36,42
																	Predikat Kinerja	SR	Sangat Rendah	0,05	Sangat Rendah	SR	Sangat Rendah	0	SR
	30343	Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	Persentase Berita Media Massa dan Isu Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianalisis dan disebarluaskan	100 %	29.525.000,000			100 %	4.644,586.422	25	543.627,750	2	412.890,805				27	956,518.555	27,00	21	27	956.518,555	0,27	3,24	
	303 43001	Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Jumlah buku analisis berita media massa dan isu publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	63 buku	9.550.000,000			63 Buku	1.821,059.422	12	410.275,600	12	243.989,505				24	654,265.105	38,10	36	24	654.265,105	0,38	6,85	
	303 43002	Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi serta Penyebarluasan Informasi Pendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jumlah infografis/videografis pendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan	12 Terbitan	8.308.000,000			12 Terbitan	942.247,000	3	2.505.000	3	47.796,300				6	50.301,300	50,00	5	6	50.301,300	0,50	0,61	

		Pengendalian dan Evaluasi Ketersediaan Informasi serta Sumber Daya Kehumasan , Keprotokolan dan Kerjasama	Jumlah laporan eva-luasi penyebarluasan isu publik dan sum-berdaya kehumasan, keprotokolan dan kerjasama yang terdokumentasikan	10	Dok	11.667.000.00			10	Dok	1.881.280.000	2	130.847.150	2	121.105.000				4	251.952.150	40,00	13	4	251.952 .150	2,16		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja	5,0	20,6	27,00	24	5	21	20,59
																				Predikat Kinerja	SR	Sangat Rendah	18,52	Sangat Rendah	SR	Sangat Rendah	19 SR
		Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	100 %	56.333.625.500				100 %	12.183.000.000	25	3.344.433.007	25	3.176.731.080					50	6.521.164.087	50,00	54	50	6.521.164.087	0,50	11,58	

			Pendokumen ntasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	Jumlah Hasil Olah Konten Dokumentasi Kegiatan	6	Paket	12.450.000,8 00		10	Dok	3.011,5 30.000	2	731.420,94 3	2	237.694,5 00				4	969,11 5.443	40,00	32	4	969.115 .443	0,6 7	7,78		
		303440 03	Penerbitan dan Penyebarlu asan produk- produk kehumasan	Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	3	Produk	6.793.167,00 0		5	Prod	1.641,0 45.000	2	222.056,32 0	1	662.566,2 80				3	884,62 2.600	60,00	54	3	884.622 .600	1,0 0	13,0 2		
		30345	Program Peningkata n Kuantitas dan Kualitas Administras i Kerjasama	Percentase Dokumen Kerjasama yang disetujui dengan Mitra Kerjasama Luar Negeri	10 0	%	26.379.638,5 00		10 0	%	2.937,0 61.400	25	469.153,62 0	25	30.316,00 0				50	499,46 9.620	50,00	17	50	499.469 .620	0,5 0	1,89		
				Percentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang terdokumenta sikan	10 0	%																						
				Percentase Hasil Monitoring dan Evaluasi	10 0	%																						

		30345 001	Hubungan Luar Negeri	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang dihasilkan	11	Dok	15.200.573.0 00		10	Dok	1.314.6 21.000	2	200.728.51 8	1	2.900.000				3	203.62 8.518	30,00	15	3	203.628 .518	0,2 7	1,34	
		30345 002	Hubungan Dalam Negeri	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan	10 5	Dok	6.272.000.00 0		40 0	Dok	1.050.0 00.000	33	185.052.12 2	33	24.566.00 0				66	209.61 8.122	16,50	20	66	209.618 .122	0,6 3	3,34	
		30345 003	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administra si Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi	30	Dok	4.907.065.50 0		40	Dok	572.440 .400	3	83.372.980	1	2.850.000				4	86.222. 980	10,00	15	4	86.222. 980	0,1 3	1,76	
Rata-Rata Capaian Kinerja																			35,0	17,0	50,00	17	35	17	50	17,0 1	
Predikat Kinerja																			SR	Sangat Rendah	70,00	Sangat Rendah	SR	Sangat Rendah	70	SR	
		30387	Program Peningkata n Pelayanan Keprotokola n	Persentase Layanan Keprotokolan	10 0	%	53.055.000.0 00		10 0	%	9.664.8 30.000	25	1.671.878. 950	25	666.351.9 01				50	2.338.2 30.851	50,00	24	50	2.338.2 30.851	0,5 0	4,41	
		30387 001	Pelayanan Keprotokola n Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Jumlah Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	75 0	Kegia tan	38.430.000.0 00		73 0	Keg	6.473.8 70.000	175	1.015.221. 550	17 5	486.093.4 01				350	1.501.3 14.951	47,95	23	35 0	1.501.3 14.951	0,4 7	3,91	

		30387 002	Pelayanan Keprotokola n Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu	20 0	Kegia tan	8.040.000.00 0		18 0	Keg	1.839,2 40.000	40	368.436,65 0	40	73.803,50 0					80	442,24 0,150	44,44 24		80	442.240 .150	0,4 0	5,50	
		30387 003	Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokola n	Jumlah Permintaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	10 00	Dok	6.585.000.00 0		85 0	Permi ntaan	1.351,7 20.000	150	288.220,75 0	15 0	106.455,0 00					50	394,67 5.750	5,88 29		50	394.675 .750	0,0 5	5,99	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		65,0	24,2	50,00	24	65	24,2	50	24,1 9	
		Predikat Kinerja																		Rend ah	Sangat Rendah	130,0 0	Sangat Rendah		Sangat Rendah	13 0	San gat Ren dah	

2.2 Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat daerah Tahun 2020.

A. Permasalahan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Biro Humas dan Protokol masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yaitu :

- a. Pandemi bencana Covid-19 yang berkepanjangan, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
- b. Informasi-informasi positif tentang Jawa Timur belum semuanya terpublikasi di media massa cetak baik harian maupun mingguan.
- c. Belum semua media massa khususnya media on line memuat siaran pers yang dikeluarkan Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim.
- d. Adanya perbedaan sudut pandang antara pemerintah daerah dengan insan pers terhadap esensi pemberitaan yang positif dan negative, terkait kebijakan redaksi.
- e. Kunjungan Kerja Pejabat negara, Pejabat pemerintah dan Tamu Negara di Jawa Timur Frekwensinya sangat tinggi dan kurang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga terjadi miss communication dalam rangka pelayanan keprotokolann yang berdampak terhadap kualitas pelayanan dan terkesan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang tanggap dalam memberikan pelayanan.
- f. Personil Protokol yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas sehingga apabila ada kegiatan yang penyelenggarannya dilaksanakan secara bersamaan baik yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda atau Tamu Pemerintah tidak terpenuhi unsur keprotokolannya.
- g. Tingginya kegiatan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh SKPD yang mengundang Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda waktunya hampir bersamaan, sehingga sangat kesulitan dalam pembuatan undangan resmi termasuk mengedarkan undangan resmi karena waktu dan petugas terbatas. Selama ini sudah menerapkan “satu Pintu” dalam pembuatan undangan resmi terutama yang menghadirkan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda

B. Penyelesaian

- a. Mematuhi aturan-aturan yang di perintahkan Presiden / Pimpinan agar bencana Covid-19 segera berakhir.

- b. Mengirimkan siaran pers ke seluruh media massa dan memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui media on line dan media social.
- c. Melakukan Up date informasi secara rutin melalui website.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jumpa pers dan memesan ruang pemberitaan di media massa berupa public ekspose serta menyediakan ruangan khusus berupa Press Room untuk aktivitas insan pers di lingkungan Kantor Gubernur dan Gedung Negara Grahadi.
- e. Komunikasi ditingkatkan baik secara formal dengan mengadakan rapat koordinasi bersama dan informal dengan cara komunikasi secara langsung dengan penyelenggara kegiatan kunjungan kerja sehingga dapat terkomunikasikan hal-hal yang dibutuhkan serta dalam rangka kelancaran kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tamu Negara.
- f. Penambahan staf Protokol dengan mengajukan penambahan pegawai kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- g. Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh SKPD wajib berkoordinasi dengan Biro Humas dan Protokol terutama terkait dengan tanggal pelaksanaan acara sehingga dalam rangka pembuatan undangan resmi tidak terjadi keterlambatan dan kesulitan dalam mengundang atau pengiriman undangannya.

Biro Humas dan Protokol merupakan unsur penunjang yang secara struktur organisasi berada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan berfungsi sebagai pendukung teknis kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Sehingga dalam hal usulan program/kegiatan dari masyarakat, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada Biro Humas dan Protokol.

Membuka akses informasi dalam setiap penyusunan kebijakan, anggaran maupun program pembangunan dalam tata laksana organisasi, SDM Aparatur, dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga tercipta OPD yang menurut Ibu Gubernur: CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif).

Bab III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi: “Tata kelola Pemerintahan yang bersih, Inovatif, Terbuka dan Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinnekaan”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kehumasan, Keprotokolan dan Administrasi Kerjasama, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang hubungan masyarakat, tugas-tugas keprotokolan dan administrasi kerjasama.

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan RenjaBiro Humas dan Protokol.

Tujuan Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Jatim yang terdapat dalam Perubahan Rencana Strategis Biro Humas dan Protokol Tahun 2020 adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

Indikator Tujuan Dan Sasaran Serta Target Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Target	
				RENJA 2020	RENJA P 2020 (dampak COVID-19)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Target dokumen analisis isu publik yang disebarluaskan terhadap Realisasi isu pulik yang disebarluaskan (%)	97%	97%
			Persentase Target kepuasan masyarakat penerima produk informasi (SKM) terhadap masyarakat penerima produk informasi (%)	97,50%	97,50%
			Presentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keprotokolan (SKM) (%)	97%	97%
			Persentase kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terdokumentasikan terhadap kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terdokumentasikan	92%	92%

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Susunan Program dan Kegiatan Biro Humas dan Protokol yang terdiri dari

5 (Lima) Program dengan 15 Kegiatan:

1 Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi

- a Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Beritadan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur
- b Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi serta Penyebarluasan Informasi Pendukung KebijakanPemerintah Provinsi Jawa Timur
- c Pengendaliandan Evaluasi Ketersediaan Informasi serta Sumber Daya Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama.

- 2 Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi**
 - a Penyebarluasan Informasi serta Pembinaan dan Keikutsertaan dengan Lembaga Pers
 - b Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia
 - c Penerbitan dan Penyebarluasan produk-produk kehumasan
- 3 Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama**
 - a Hubungan Luar Negeri
 - b Hubungan Dalam Negeri
 - c Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama
- 4 Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan**
 - a Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah
 - b Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara
 - c Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan
- 5 Program Pelayanan Kesekretariatan**
 - a Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
 - b Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - c Ketatausahaan dan Kepegawaian

Tabel 3.1 (TC 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020					Hasil Analisa Kehutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pelayanan Kesekretariatan	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	80 %	2.541.578.378	Program Pelayanan Kesekretariatan	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	100 %	2.541.578.378	Jumlah PTT 17 orang
			Persentase realisasi anggaran	90 %				Persentase realisasi anggaran	90 %		
			Indeks profesionalitas ASN	89 %				Indeks profesionalitas ASN	89 %		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jawa Timur	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	5 Dok	116.665.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jawa Timur	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	5 Dok	116.665.000	
2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jawa Timur	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Dok	104.360.000	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jawa Timur	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Dok	104.360.000	
3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 Dok	2.320.553.378	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 Dok	2.320.553.378	
B	Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	Jawa Timur	Persentase Berita Media Massa dan Isu Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianalisisdan disebarluaskan	100 %	4.644.586.422	Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	Jawa Timur	Persentase Berita Media Massa dan Isu Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianalisisdan disebarluaskan	100 %	4.644.586.422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan Hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	Jumlah buku analisis berita media massa dan isupublik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	63 buku	1.821.059.422	Monitoring Media Massa dan Analisis Berita serta Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	Jumlah buku analisis berita media massa dan isupublik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	63 buku	1.821.059.422	
2	Pengumpulan dan Pengolahan Data/ Informasi serta Penyebarluasan Informasi Pendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	Jumlah infografis/videografis pendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan	12 terbitan	942.247.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data/ Informasi serta Penyebarluasan Informasi Pendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur	Jumlah infografis/videografis pendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan	12 terbitan	942.247.000	
3	Pengendalian dan Evaluasi Ketersediaan Informasi serta Sumber Daya Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Jawa Timur	Jumlah laporan evaluasi penyebarluasan isu publik dan sumberdaya kehumasan, keprotokolan dan kerjasama yang terdokumentasikan	10 Dokumen	1.881.280.000	Pengendalian dan Evaluasi Ketersediaan Informasi serta Sumber Daya Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Jawa Timur	Jumlah laporan evaluasi penyebarluasan isu publik dan sumberdaya kehumasan, keprotokolan dan kerjasama yang terdokumentasikan	10 Dokumen	1.881.280.000	
C	Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Jawa Timur	Percentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	100 %	12.183.000.000	Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Jawa Timur	Percentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	100 %	12.183.000.000	
1	Penyebarluasan Informasi serta Pembinaan dan Keikutsertaan dengan Lembaga Pers	Jawa Timur	Jumlah Perusahaan/Lembaga Pers yang Menjalin Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol	50 Perusahaan	7.530.425.000	Penyebarluasan Informasi serta Pembinaan dan Keikutsertaan dengan Lembaga Pers	Jawa Timur	Jumlah Perusahaan/Lembaga Pers yang Menjalin Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol	50 Perusahaan	7.530.425.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	Jawa Timur	Jumlah Hasil Olah Konten Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	6 Paket	3.011.530.000	Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	Jawa Timur	Jumlah Hasil Olah Konten Dokumentasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	6 Paket	3.011.530.000	
3	Penerbitan dan Penyebarluasan produk-produk kehumasan	Jawa Timur	Jumlah Produk Kehumasan yang Diterbitkan dan Disebarluaskan	3 Produk	1.641.045.000	Penerbitan dan Penyebarluasan produk-produk kehumasan	Jawa Timur	Jumlah Produk Kehumasan yang Diterbitkan dan Disebarluaskan	3 Produk	1.641.045.000	
D	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama	Jawa Timur	Percentase Dokumen Kerjasama yang disetujuidengan Mitra Kerjasama Luar Negeri	100 %	2.937.061.400	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama	Jawa Timur	Percentase Dokumen Kerjasama yang disetujuidengan Mitra Kerjasama Luar Negeri	100 %	2.937.061.400	
			Percentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang terdokumentasikan	100 %				Percentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang terdokumentasikan	100 %		
			Percentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama yang terdokumentasikan	100 %				Percentase Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama yang terdokumentasikan	100 %		
1	Hubungan Luar Negeri	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang dihasilkan	11 Dokumen	1.314.621.000	Hubungan Luar Negeri	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang dihasilkan	11 Dokumen	1.314.621.000	
2	Hubungan Dalam Negeri	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan	105 Dokumen	1.050.000.000	Hubungan Dalam Negeri	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan	105 Dokumen	1.050.000.000	
3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang tersusun	30 Dok	572.440.400	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang tersusun	30 Dok	572.440.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jawa Timur	Persentase Layanan Keprotokolan	100 %	9.664.830.000	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jawa Timur	Persentase Cakupan Layanan Keprotokolan	100 %	9.664.830.000	
1	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Jawa Timur	Jumlah Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	750 Keg	6.473.870.000	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Jawa Timur	Jumlah Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	750 Keg	6.473.870.000	
2	Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jawa Timur	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu	200 Kegiatan	1.839.240.000	Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jawa Timur	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu	200 Kegiatan	1.839.240.000	
3	Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan	Jawa Timur	Jumlah Permintaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	1000 Dokumen	1.351.720.000	Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	Jawa Timur	Jumlah Permintaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	1000 Dokumen	1.351.720.000	
	31.971.056.200										31.971.056.200

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2020

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020
Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Kode	Urusan / Bidang pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi Perubah an	Pagu RKPD Murni	Pagu Anggaran SudahPerubahan	Bertambah / Berkurang	Sumber Dana
		Tolak Ukur	Target		Tolak Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
xxx01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	80%	Jawa Timur	Persentase indikator program yang tercapai	80%	Jawa Timur	2.153.302.000	2.541.578.378	-388.276.378	APBD
		Persentase realisasi anggaran	90%		Persentase realisasi anggaran	90%	Jawa Timur			0	
		Indeks profesionalitas ASN	89%		Indeks profesionalitas ASN	89%	Jawa Timur			0	
xxx010 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	5 Dok	Jawa Timur	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	5 Dok	Jawa Timur	240.000.000	116.665.000	123.335.000	
xxx010 02	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Dok	Jawa Timur	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Dok	Jawa Timur	73.000.000	104.360.000	-31.360.000	
xxx010 03	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 Dok	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	6 Dok	Jawa Timur	2.250.030.200	2.320.553.378	-70.523.178	
30343	Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan Informasi	Persentase Berita Media Massa dan Isu Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianalisis dan disebarluaskan	100%	Jawa Timur	Persentase Berita Media Massa dan Isu Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dianalisis dan disebarluaskan	100%	Jawa Timur	5.860.000.000	4.644.586.422	1.215.413.578	APBD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303 43001	Monitoring Media Massa dan Penyebarluasan hasil Analisis Berita dan Isu Publik Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	Jumlah buku analisis berita media massa dan isu publik Peme-rintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	63 Buku	Jawa Timur	Jumlah buku analisis berita media massa dan isu publik Peme-rintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan	63 Buku	Jawa Timur	1.750.000.000	1.821.059.422	-71.059.422	
303 43002	Pengumpulan dan Pengolahan Data/Informasi serta Penyebarluasan Informasi Pendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan	Jumlah infografis/ videografis pendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan	12 Terbitan	Jawa Timur	Jumlah infografis/ videografis pendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan	12 Terbitan	Jawa Timur	1.520.000.000	942.247.000	577.753.000	
303430 03	Pengendalian dan Evaluasi Ketersediaan Informasi serta Sumber Daya Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama yang terdokumentasikan	Jumlah laporan eva-luasi penyebarluasan isu publik dan sumberdaya kehumasan, keprotokolan dan kerjasama yang terdokumentasikan	10 Dok	Jawa Timur	Jumlah laporan evaluasi penyebarluasan isu publik dan sum-berdaya kehumasan, keprotokolan dan kerjasama yang terdokumentasikan	10 Dok	Jawa Timur	2.590.000.000	1.881.280.000	708.720.000	
30344	Program Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi	Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	100%	Jawa Timur	Persentase Tersebarluasnya Informasi kepada Masyarakat	100%	Jawa Timur	11.000.000.000	12.183.000.000	-1.183.000.000	APBD
303440 01	Penyebarluasan Informasi serta Pembinaan dan Keikutsertaan dengan Lembaga Pers	Jumlah Perusahaan/ Lembaga Pers yang Menjalin Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol	50 Perusa han	Jawa Timur	Jumlah Perusahaan/ Lembaga Pers yang Menjalin Kerjasama dengan Biro Humas dan Protokol	50 Perusa han	Jawa Timur	7.300.000.000	7.530.425.000	-230.425.000	
303440 02	Pendokumentasian Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta Olah Konten Multimedia	Jumlah Hasil Olah Konten Dokumentasi Kegiatan	6 Paket	Jawa Timur	Jumlah Hasil Olah Konten Dokumentasi Kegiatan	6 Paket	Jawa Timur	2.400.000.000	3.011.530.000	-611.530.000	
303440 03	Penerbitan dan Penyebarluasan produk-produk kehumasan	Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	3 Produk	Jawa Timur	Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	3 Produk	Jawa Timur	1.300.000.000	1.641.045.000	-341.045.000	APBD
30345	Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Administrasi Kerjasama	Persentase Dokumen Kerjasama yang disetujui dengan Mitra Kerjasama Luar Negeri	100%	Jawa Timur	Persentase Dokumen Kerjasama yang disetujui dengan Mitra Kerjasama Luar Negeri	100%		5.160.000.000	2.937.061.400	2.222.938.600	APBD
		Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang terdokumentasikan	100%		Persentase Kesepa-katan dan Perjanjian Kerjasama yang terdokumentasikan	100%					
		Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi	100%		Persentase Hasil Monitoring dan Evaluasi	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30345 001	Hubungan Luar Negeri	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang dihasilkan	11 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Luar Negeri yang dihasilkan	11 Dokumen		3.000.000.000	1.314.621.000	1.685.379.000	
30345 002	Hubungan Dalam Negeri	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan	105 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Rumusan Dokumen Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan	105 Dokumen		1.210.000.000	1.050.000.000	160.000.000	
30345 003	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi	30 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Evaluasi	30 Dok		950.000.000	572.440.400	377.559.600	
30387	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase Layanan Keprotokolan	100%	Jawa Timur	Persentase Layanan Keprotokolan	100%		10.224.000.000	9.664.830.000	559.170.000	APBD
30387 001	Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	Jumlah Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	750 Keg	Jawa Timur	Jumlah Pelayanan Keprotokolan kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah	750 Keg		7.404.000.000	6.473.870.000	930.130.000	
30387 002	Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu Negara	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu	200 Kegiatan	Jawa Timur	Jumlah Pelayanan Keprotokolan Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah, Pejabat Negara dan Tamu	200 Kegiatan		1.560.000.000	1.839.240.000	-279.240.000	
30387 003	Pelayanan Pengadaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan	Jumlah Permintaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	1000 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Permintaan Undangan Resmi Gubernur dan Kelengkapan Keprotokolan yang terpenuhi	1000 Dokumen		1.260.000.000	1.351.720.000	-91.720.000	

Bab IV

PENUTUP

Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini menjadi dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, dengan keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
- b. Percepatan perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- e. Partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan.

Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini akan menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga.

Kepala Biro Humas Dan Protokol



AGUNG SUBAGYO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750330 199603 1 004